

**PENGARUH BESAR PAGU DAN REVISI ANGGARAN TERHADAP  
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATKER-SATKER  
PEMERINTAH PUSAT DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

**MARINI**  
**01111303027**  
**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran Terhadap  
Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker  
Pemerintah Pusat di Kota Palembang**

Disusun oleh :

Nama : Marini  
NIM : 01111303027  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 26 / Mei / 2014

Ketua:   
Hj. ROCHMAWATI DAUD, S.E, M.Si, Ak.  
NIP. 196409031994032001

Tanggal: 30 / Mei / 2014

Anggota :   
IKA SASTI FERINA, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP.197802102001122001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang

Disusun oleh:

Nama : Marini  
NIM : 01111303027  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 16 Juni 2014

Ketua



Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak  
NIP. 196409031994032001

Anggota



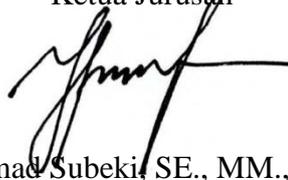
Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 197802102001122001

Anggota



Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM., Ak  
NIP. 196503111992032002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE., MM., Ak  
NIP. 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marini

NIM : 01111303027

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang

Pembimbing:

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Ujian : 11 Juni 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, Juni 2014

Pembuat Pernyataan,



MARINI

NIM 01111303027

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya jika hamba tersebut menolong saudaranya.”(HR Muslim)

*“Being rich is not about how much you have, but how much you can give”*

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- **Orang tua dan saudaraku tersayang**
- **Suamiku tercinta**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Teman-teman akuntansi 2011**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang”** yang merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan yaitu data tentang besar pagu pada masing-masing satker, jumlah revisi yang dilakukan yang dikelompokkan per semesteran pada masing-masing satker, serta realisasi/ penyerapan anggaran satker per semesteran selama periode 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel besar pagu berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan variabel revisi anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan hasil uji hipotesis secara simultan (bersama-sama) menunjukkan bahwa variabel besar pagu dan revisi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada satker-satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Palembang, Juni 2014

MARINI

## ABSTRAK

### **Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-Satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang**

**Oleh:  
Marini**

Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada terlambatnya pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan Negara, dan terhambatnya peluang investasi pemerintah. Pada tahun anggaran 2010 dan 2011, penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat semester pertama masing-masing baru sebesar 29,88% dan 30,40% dari pagu anggarannya. Hal ini berarti bahwa lebih dari 50% penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan belanja modal menumpuk di semester kedua. Beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyerapan anggaran ini adalah besarnya pagu anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan revisi anggaran yang dilakukan oleh masing-masing satker. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh besar pagu dan revisi anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satker-satker pemerintah pusat yang terdapat di Kota Palembang.

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja pemerintah pusat yang berada di wilayah kerja KPPN Palembang. Karena pertimbangan atas data yang dapat diakses yaitu data tahun 2013, maka teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode sensus yaitu jumlah sampel adalah jumlah populasi. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi berganda yang didahului dengan pengujian data *outlier*, analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik agar model regresi memenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel besar pagu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan variabel revisi anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satker-satker pemerintah pusat di Kota Palembang.

***Kata kunci: Pemerintahan, Revisi Anggaran, Besar Pagu, Penyerapan Anggaran***

## **ABSTRACT**

### **The Influence of Platform Size and Budget Revision on the Financial Absorption (Expenses) by Working Units of the Central Government in Palembang**

**By:  
Marini**

Late use of budgeted expenses can cause economic growth to slow down, economic losses in the management of the state money, and hindrance to incoming investments. In 2010 and 2011, the financial absorption (expenses) pointed to 29,88% and 30,40% respectively compared to the targeted sums. This means that over 50% of the expenses were not spent for the budgeted goods and the unspent expenses were accumulated in the second semester. Such late implementation was due to the fact that the platform sizes did not match to buy necessary goods and revisions of the budgeted expenses were made by each working unit.

The population of this research was all working units of the Central Government under KPPN Palembang (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang). The sample focused on the data of 2013, that is, the sample obtained was equal to the number of population. This research used the multiple regression analysis. The outlier data were first analyzed and tested in order to fulfil the criteria of BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). The research results show that the platform sizes did not have a significant influence on the absorbed spending whereas the budget revision did so.

***Key words: Government, budget revision, platform size, absorption.***

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Marini

NIM : 01111303027

Judul Skripsi : Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, Juni2014

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Hj. Rochmawati Daud, S.E, M.Si, Ak.  
NIP 196409031994032001

Anggota,



Ika Sasti Ferina , S.E, M.Si, Ak, CA  
NIP 19780210200112001

## **RIWAYAT HIDUP**

**Nama Mahasiswa** : Marini  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Palembang, 14 Maret 1989  
**Agama** : Islam  
**Alamat Rumah (Orang Tua):** Jl. Irigasi No.3320 Rt. 54 Rw.15 Pakjo  
UjungPalembang 30153  
**Alamat Email** : marini.fb@gmail.com

### **Pendidikan Formal :**

**Sekolah Dasar** : SD Negeri 113 Palembang  
**SLTP** : SMP Negeri 3 Palembang  
**SMU** : SMA Negeri 3 Palembang  
**D3** : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

- Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., PhD, Rektor Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Ibu Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
- Ibu Ika Sasti Ferina , S.E, M.Si, Ak, CA Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Kedua orang tua ( Drs. H. Fauzie Abdullah dan Hj. Murdiningsih, S.Pd., M.Kes) dan saudaraku tersayang terima kasih untuk segala dukungan, semangat, doa dan bantuannya.

- Qori Kharismawan, suamiku tercinta terima kasih untuk semangatnya, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan baik moril maupun materiil, serta doa-doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan.
- Semua sahabat dan teman-teman angkatan 2011, kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Dan kepada semua pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan bantuannya.

Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat saya haturkan atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan melimpahkan berkah kepada kita semua. Aamiin.

Penulis

**MARINI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN GRAMMAR .....</b>	<b>i</b> Error! Bookmark not defined.
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. <b>LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
1.2. <b>PERUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>8</b>
1.3. <b>TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
1.4. <b>MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
1.5. <b>SISTEMATIKA SKRIPSI .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. <b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 <i>Teori Multiplier Effect .....</i>	<i>11</i>
2.1.2 <i>Pengertian Anggaran Sektor Publik.....</i>	<i>13</i>
2.1.3 <i>Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik.....</i>	<i>14</i>
2.1.4 <i>Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.....</i>	<i>15</i>
2.1.5 <i>Pelaksanaan Anggaran.....</i>	<i>20</i>
2.1.6 <i>Pengertian Revisi Anggaran.....</i>	<i>24</i>
2.1.7 <i>Pengertian Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .....</i>	<i>25</i>
2.1.8 <i>Pengertian Daya Serap Anggaran Kementerian Negara/Lembaga... ..</i>	<i>26</i>
2.2. <b>PENELITIAN SEBELUMNYA .....</b>	<b>26</b>
2.3. <b>KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>28</b>
2.4. <b>HIPOTESIS.....</b>	<b>29</b>

<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	32
3.2. RANCANGAN PENELITIAN.....	33
3.3. SUMBER DATA .....	34
3.4. POPULASI DAN SAMPEL .....	34
3.5. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL.....	36
3.6. TEKNIK ANALISIS .....	38
3.6.1. <i>Analisis Statistik Deskriptif</i> .....	38
3.6.2. <i>Uji Asumsi Klasik</i> .....	39
3.6.3. <i>Analisis Regresi Linier Berganda</i> .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF .....	44
4.2. HASIL PENGUJIAN ASUMSI KLASIK .....	46
4.2.1 <i>Uji Normalitas</i> .....	47
4.2.2 <i>Uji Multikolinearitas</i> .....	48
4.2.3 <i>Uji Heteroskedastisitas</i> .....	49
4.3. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS .....	51
4.3.1 <i>Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>)</i> .....	51
4.3.2 <i>Analisis Varians atau Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)</i> .....	53
4.3.3 <i>Uji Parsial (Uji-t)</i> .....	54
4.4. PEMBAHASAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. KESIMPULAN .....	59
5.2. KETERBATASAN DAN SARAN.....	60
5.3. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA KE DAERAH SEMESTER I DAN II TA 2010 DAN 2011 .....	4
TABEL 2.1 PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN LAIN YANG RELEVAN	27
TABEL 3.1 JUMLAH SATUAN KERJA PADA KPPN PALEMBANG .....	35
TABEL 3.2 OPERASIONALISASI VARIABEL .....	37
TABEL 4.1 STATISTIK DESKRIPTIF .....	45
TABEL 4.2 NILAI VIF ( <i>VARIANCE INFLATION FACTOR</i> ) .....	48
TABEL 4.3 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN UJI GLEJSER .....	50
TABEL 4.5 <i>MODEL SUMMARY</i> .....	52
TABEL 4.6 HASIL UJI SIMULTAN (UJI-F) .....	54
TABEL 4.7 HASIL UJI PARSIAL (UJI-T) .....	55

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 KERANGKA PEMIKIRAN .....	29
GAMBAR 4.1 HISTOGRAM DAN GRAFIK <i>NORMAL P-P PLOT</i> .....	47
GAMBAR 4.2 HASIL PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS DENGAN <i>SCATTER PLOT</i> ..	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan dalam manajemen keuangan negara mulai tahun 2003 yang ditandai dengan dikeluarkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ketiga paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara.

Dalam struktur dan format APBN berdasarkan UU No. 17/2003, belanja negara meliputi belanja-belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat, dan untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan belanja

untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu berupa transfer ke daerah dalam bentuk pengeluaran/alokasi anggaran berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah, dan berupa dana otonomi khusus dan penyesuaian yang meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh masing-masing K/L yang merupakan entitas pengelola anggaran Pemerintah. Eksekusi belanja Pemerintah pusat menurut organisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Sesuai dengan prinsip *let the managers manage*, setelah reformasi manajemen keuangan negara, setiap K/L bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi anggaran belanja yang dikelolanya. (LKPP, 2011:38)

Untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anggaran dialokasikan kepada Kementrian Negara/Lembaga. Adapun sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pendidikan Nasional tetap merupakan kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, walaupun untuk peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah di tahun sebelumnya ada di peringkat ketiga setelah Kementerian Pertahanan.(LKPP, 2011:38)

Meskipun Undang-Undang tentang Keuangan Negara telah dihasilkan sebelas tahun yang lalu, dan perangkat undang-undang tentang perbendaharaan negara yaitu UU No. 1 tahun 2004 telah dipraktekan dalam sepuluh tahun terakhir ini, namun masalah lambatnya penyerapan dana APBN oleh kementerian negara/lembaga dan satker-satker di bawahnya masih saja terus terjadi. Berdasarkan data yang penulis himpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2010 dan 2011, realisasi belanja pemerintah pusat yang sebagian dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga maupun dana yang ditransfer ke daerah berupa dana perimbangan, belum mencerminkan persentase yang baik berdasarkan periode per semester. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja ke Daerah Semester I dan II TA 2010 dan 2011**

(dalam triliun rupiah)

BELANJA	PAGU TA 2011 *)	PAGU TA 2010 *)	REALISASI BELANJA							
			SEMESTER I				SEMESTER II **)			
			TA 2011		TA 2010		TA 2011		TA 2010	
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
Belanja Pemerintah Pusat	836,578	781,533	254,278	30,40	233,529	29,88	883,721	97,30	697,406	89,24
1. Belanja Pegawai	180,824	162,659	80,394	44,46	73,091	45,00	175,737	95,46	148,078	91,04
2. Belanja Barang	137,849	112,594	32,271	23,41	29,261	25,98	124,639	87,57	97,596	86,68
3. Belanja Modal	135,854	95,024	20,289	14,94	16,372	17,23	117,854	81,52	80,287	84,49
4. Pembayaran Bunga Utang	115,209	105,650	46,688	40,52	43,397	41,07	93,261	87,50	88,383	83,66
5. Subsidi	187,624	201,262	61,967	33,03	51,733	25,70	295,358	123,86	192,707	95,75
6. Belanja Hibah	771	243	36	4,69	-	-	300	70,42	70	28,78
6. Belanja Bansos	63,183	71,172	11,871	18,79	18,789	26,40	71,104	91,79	68,611	96,40
7. Belanja Lain-lain	15,260	32,926	759	4,97	884	2,68	5,465	38,21	21,672	65,82
Belanja ke Daerah:	392,980	344,612	182,537	46,45	161,600	46,89	411,324	99,71	344,727	100,03
1. Dana Perimbangan	334,324	314,363	164,521	49,21	153,805	48,92	347,246	99,92	316,711	100,75
a. Dana Bagi Hasil	83,558	89,618	25,865	30,96	29,434	32,84	96,908	100,14	92,183	102,86
b. Dana Alokasi Umum	225,532	203,606	131,502	58,31	117,699	57,80	225,533	100,00	203,571	9,98
c. Dana Alokasi Khusus	25,232	21,138	7,153	28,35	6,671	31,56	24,803	98,30	20,956	99,14
2. Dana Otsus & Peny.	58,656	30,249	18,016	30,72	7,794	25,76	64,078	98,63	28,016	92,62
a. Dana Otsus	10,421	9,099	3,126	30,00	2,413	26,52	10,421	100,00	9,099	100,00
b. Dana Penyesuaian	48,234	21,150	14,889	30,87	5,381	25,44	53,657	98,37	18,916	89,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I dan II TA 2011 dan 2010

\*) Pagu Anggaran Semula

\*\*) Persentase realisasi Semester II bukan hasil perbandingan dengan pagu anggaran semula, melainkan hasil perbandingan dengan pagu anggaran perubahan.(APBN-P)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat semester pertama tahun anggaran 2010 dan 2011 masing-masing

hanya sebesar 29,88% dan 30,40% dari pagu anggarannya, dan penyerapan belanja ke daerah masing-masing sebesar 46,89% dan 46,45%. Sedangkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 dan 2011, penyerapan belanja pemerintah pusat masing-masing sebesar 89,24% dan 97,30% dari pagu anggaran perubahannya, dan penyerapan belanja ke daerah masing-masing sebesar 100,03% dan 99,71%.

Pada semester pertama tahun anggaran 2010, rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (29,88%) lebih disebabkan karena terlalu rendahnya realisasi belanja oleh kementerian negara/lembaga (K/L) yaitu belanja barang (25,98%), belanja modal (17,32%), belanja hibah (0%), bantuan sosial (26,40%), dan selebihnya adalah belanja lain-lain (2,68%). Sedangkan rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja ke daerah lebih disebabkan karena rendahnya penyerapan Dana Bagi Hasil (32,84%), Dana Alokasi Khusus (31,56%), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (25,76%). Pada semester kedua atau akhir tahun anggaran 2010, meskipun belanja pemerintah pusat secara keseluruhan mencapai 89,24%, tetapi realisasi oleh kementerian negara/lembaga berupa belanja barang (86,68%) dan belanja modal (84,49) masih terbilang rendah.

Sama halnya dengan semester pertama tahun 2010, rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (30,40%) pada semester pertama tahun anggaran 2011, juga lebih disebabkan karena terlalu rendahnya realisasi anggaran oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk belanja barang (23,41%), belanja modal (14,94%), belanja hibah (4,69%), dan belanja bantuan

sosial (18,79%), selebihnya adalah belanja lain-lain (4,97%). Sedangkan rendahnya persentase realisasi anggaran belanja ke daerah lebih disebabkan karena rendahnya penyerapan Dana Bagi Hasil (30,96%), Dana Alokasi Khusus (28,35%), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (30,72%). Pada semester kedua atau akhir tahun anggaran 2011, meskipun realisasi belanja pemerintah pusat secara keseluruhan mencapai 97,30%, tetapi realisasi belanja modal (81,52%), belanja hibah (71,42%) dan belanja lain-lain (38,21%) masih terbilang rendah.

Salah satu contoh belanja pemerintah pusat yang diharapkan dapat segera dilaksanakan adalah belanja modal. Kondisi yang diinginkan belanja modal tersebut dapat segera dilaksanakan pada awal tahun sesuai dengan tujuan perencanaan yaitu agar dampak positifnya dapat segera dirasakan pada tahun berjalan. Namun pada kenyataannya, penyerapan belanja modal di awal tahun sangatlah rendah. Dampak dari hal ini adalah timbulnya kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dengan realita yang ada.

Setelah dianalisis lebih lanjut, beberapa penyebab yang mungkin dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyerapan APBN khususnya oleh kementerian Negara/lembaga berdasarkan kajian singkat yang telah dilakukan oleh Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) atas 7 Kementerian/Lembaga (K/L) terbesar pengelola belanja antara lain adalah permasalahan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain

seperti adanya peningkatan alokasi belanja K/L pada saat terjadi perubahan APBN sebagaimana tertuang dalam APBN-P.

Pada aspek dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul bersifat legal administratif. Seperti, rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB, data pendukung, usulan kegiatan yang dibatasi (antara lain pengadaan kendaraan dan pembangunan gedung), penggunaan PHLN yang belum efektif (loan agreement belum ditandatangani atau belum ada nomor register), pemanfaatan PNBPN yang tidak sesuai dengan dasar hukum penggunaan PNBPN, kegiatan yang memerlukan ijin kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan belum dilengkapi dokumen pendukung.

Revisi dokumen anggaran (DIPA) mencapai 2.047 per Juni 2010 yang disebabkan antara lain karena perencanaan anggaran yang kurang baik di K/L, tambahan pagu, pergeseran antar bagian anggaran, kesalahan bagan akun standar, dan lain-lain. Dengan adanya proses dalam melengkapi dokumen anggaran apabila terjadi revisi tersebut, maka dampaknya juga akan berakibat pada terlambatnya proses penyerapan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Besar Pagu dan Revisi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker-satker Pemerintah Pusat di Kota Palembang”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan yang dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh besar pagu ( $X_1$ ) terhadap penyerapan anggaran (Y) satker-satker pemerintah pusat di Kota Palembang?
2. Apakah terdapat pengaruh revisi anggaran ( $X_2$ ) terhadap penyerapan anggaran (Y) satker-satker pemerintah pusat di Kota Palembang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh besar pagu dan revisi anggaran terhadap penyerapan anggaran pada satker-satker Pemerintah Pusat yang terdapat di Kota Palembang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan disiplin Akuntansi Pemerintahan atau Akuntansi Publik. Disamping itu juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat melakukan penelitian lanjutan

yang lebih mendalam tentang akuntansi pemerintahan atau akuntansi publik khususnya yang terkait dengan masalah penyerapan anggaran.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan tentang konsep dasar dalam menentukan rencana anggaran dan dapat diimplementasikan secara optimal pada lingkungan pemerintah guna mencapai hasil yang diinginkan.

## 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang proses penyusunan anggaran yang baik konseptual implementasinya serta wawasan mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses penyerapan realisasi anggaran serta solusinya.

### **1.5. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan masalah, kajian penelitian terdahulu, serta pemaparan atas kerangka pemikiran dan hipotesis sementara yang ada.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan metode analisis data.

### **BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai analisis terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari pada pengolahan data yang telah dianalisis.

### **BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran-saran yang menjadi alternatif bagi objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaeni, Shenny 2012. Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal”.Skripsi. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Carsdiawan, Didi. 2009. *Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah*. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012 dari <http://didicarsdiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/>
- Denis, Anda. 2011. *Pengaruh Perbedaan Tata Kelola Keuangan Perusahaan di Suatu Negara*. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012 dari <http://andamifardela.wordpress.com/2011/04/10/pengaruh-perbedaan-tata-kelola-keuangan-perusahaan-disuatu-negara/>
- Departemen Keuangan RI. 2008. *Modul Keuangan Negara*
- Ditjen Perbendaharaan.2009. *Modul Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja*. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Dwi, Adrianus dan Sri Lestari. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. Diambil pada tanggal 9 Oktober 2012 dari [http://www.kemenkeu.go.id/ind/Data/Artikel/Kementerian\\_lembaga.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/ind/Data/Artikel/Kementerian_lembaga.pdf)
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kementerian Keuangan RI. 2010. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2010*.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2011*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi Ke-2*. Jakarta: Bumi Aksara

- Murtini. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode 2008*. Thesis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 94/ PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sodik, Jamzani. (2007). Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12(1), April 2007: 27-36
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Toni. 2011. Permasalahan Penyerapan Anggaran (Studi Kasus KPPN Bandung I). Diambil pada tanggal 9 Oktober 2012 dari <http://tonipabayo.blogspot.com/2011/07/permasalahan-penyerapan-anggaran-studi.html>
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Wibisono, Kunto. 2012. *Perpres 70 Percepat Belanja Modal*. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012 dari <http://www.antaraneews.com/berita/329167/kemenkeu-perpres-702012-percepat-belanja-modal>
- \_\_\_\_\_. *Dampak Penghematan Terhadap Realisasi Anggaran K/L*. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2012 dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>